



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa dengan adanya status darurat bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk merespon kondisi tersebut dalam kaitannya pemenuhan dan perlindungan hak-hak Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2017 tentang Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 49);
27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 96);
28. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 Nomor 4);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Bupati Sumenep;
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
10. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
11. Unit Kerja adalah bagian pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan;
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
18. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

19. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
21. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
22. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
23. Presensi Biometrik adalah sistem presensi elektronik yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan anggota tubuh manusia baik itu sidik jari tangan, yaitu iris mata dan/atau wajah sebagai autentifikasi;
24. Admin Presensi Biometrik adalah PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Verifikator Presensi Biometrik adalah PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Operator Presensi Biometrik adalah PNS yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengoperasikan sistem Presensi Biometrik;
27. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang di dasarkan hasil evaluasi jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan pegawai;
28. Aktifitas kerja adalah aktifitas/kegiatan kerja harian yang dilaksanakan oleh setiap pegawai pada setiap hari kerja berupa kegiatan pelaksanaan terkait dengan tugas dan fungsi;
29. Validasi aktifitas kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan langsung dan/atau Atasan pejabat penilai;
30. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, Data Pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

31. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau untuk selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta kekayaan, Data Pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang tidak diwajibkan melaporkan LHKPN;
32. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPK yang bekerja pada instansi pemerintah;
34. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PARAMETER PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN, PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN, DAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Parameter Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

- (1) Setiap ASN dapat diberikan TPP.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan berdasarkan parameter :
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi.
- (3) Penjelasan lebih lanjut jenis-jenis dan kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran TPP (*basic*) didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran tertinggi TPP (basic TPP) yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP (basic TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran TPP bagi PNS masing-masing kelas jabatan di masing-masing OPD dihitung dari hasil perkalian antara basic TPP dengan Besaran Presentase Pengali TPP masing-masing kelas jabatan di masing-masing OPD.
- (2) Besaran Persentase Pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing kelas jabatan di masing-masing OPD berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang kemudian disingkat N-TPPBK untuk masing-masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD dengan persentase maksimum 40%;
 - b. Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang kemudian disingkat N-TPPPK untuk masing-masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD dengan persentase maksimum 60%;
 - c. Besaran presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja yang kemudian disingkat N-TPPKK untuk masing-masing Kelas Jabatan pada masing-masing OPD dengan persentase maksimum 10%;
 - d. Besaran presentase pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang kemudian disingkat N-TPPKP yang diberikan untuk Jabatan Sekretaris Daerah, yaitu maksimum 100%;
- (3) Nilai Besaran Persentase Pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing kelas Jabatan di masing-masing OPD dan hasil perkalian dengan basic TPP tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tim pelaksanaan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi :
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. Organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. Kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. Hukum menyusun peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - f. Pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - g. Komunikasi dan Informatika bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana terkait jaringan dan sistem informasi.
- (2) Tim pelaksanaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KRITERIAN PENERIMA TPP

Pasal 6

- (1) TPP tidak diberikan bagi :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon PPPK;
 - b. Guru/Pamong Belajar/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah/Penilik Sekolah;
 - c. ASN non guru yang bekerja di satuan pendidikan;
 - d. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - e. ASN yang menjadi Kepala Desa;
 - f. ASN yang menjadi Sekretaris Desa;
 - g. ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. ASN yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - i. ASN yang menjalani Cuti di luar tanggungan negara.
 - j. ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin.

- (2) ASN yang dikenai Sanksi Hukuman disiplin sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf j berlaku ketentuan :
 - a. bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, tidak diberikan TPP selama 1 bulan;
 - b. bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan TPP selama 2 bulan;
 - c. bagi ASN yang dikenai hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 3 bulan.
- (3) TPP dihentikan bagi ASN yang karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. pensiun dini;
 - d. dinyatakan hilang;
 - e. mutasi antar daerah, instansi vertikal dan/atau kementerian; dan
 - f. diberhentikan sebagai ASN.
- (4) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bulan berikutnya sejak terbitnya Surat Keputusan tentang status kepegawaian yang bersangkutan.

BAB IV KRITERIA DAN PENILAIAN TPP

Bagian Pertama Ketentuan Umum

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas dan kriteria lainnya yaitu dengan indikator :
 - a. capaian waktu aktifitas kerja pada jam kerja efektif;
 - b. hasil Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari masing-masing OPD pada tahun terakhir.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai; dan
 - b. tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada tahun berjalan.

- (5) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah pada saat masuk kerja, istirahat siang, setelah istirahat siang dan pada saat pulang kerja.

Bagian kedua
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 8

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi:
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. presensi istirahat siang;
 - d. presensi setelah istirahat siang;
 - e. ketidakhadiran kerja.
- (2) Perhitungan Skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kehadiran pegawai dan dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian dalam bentuk soft copy dan hard copy.
- (3) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran, pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (4) Metode penghitungan skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. PNS yang terlambat datang 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
 $0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
 - b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
 - c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$
 - d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
 $1,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$

- e. PNS yang tidak melakukan presensi istirahat siang dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
0,5% x jumlah hari tidak melakukan presensi istirahat siang
- f. PNS yang tidak melakukan presensi setelah istirahat siang dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
0,5% x jumlah hari tidak melakukan presensi tidak melakukan presensi setelah istirahat siang
- g. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
1,5% x jumlah hari kerja karena cuti
- h. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran;
 - 2) PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan sakit tidak dengan surat keterangan dokter, tidak dikenai pengurangan;
 - 3) Ketentuan bagi PNS tidak masuk kerja dengan keterangan sakit sebagaimana diatur pada angka 2) dibatasi maksimal 2 (dua) hari kerja, untuk hari ke-3 (tiga) dan seterusnya maka akan dikenai pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
2% x jumlah hari tidak masuk kerja
 - 4) PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan selain sakit (izin) dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
2,5% x jumlah hari tidak masuk kerja
- i. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
20% x jumlah hari tidak masuk bekerja
- j. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
1,5% x jumlah hari kerja pemberian dispensasi
- k. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- l. PNS yang melakukan tugas Kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara eletronik atau manual pada saat jam masuk kerja, dan/atau jam istirahat siang, dan/atau jam setelah istirahat siang, dan/atau jam pulang, maka tidak dilakukan pemotongan skor kehadiran.

- m. tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud huruf l dibuktikan dengan Surat tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. PNS yang sedang menjalani Cuti Tahunan tidak diberikan potongan atas ketidakhadiran kerjanya.
- o. PNS yang terbukti tidak mengikuti Apel Gabungan pada hari senin dan/atau Senam kesegaran jasmani/kegiatan lainnya pada hari jumat tanpa keterangan yang sah, maka status kehadirannya sama dengan keterlambatan sebagaimana diatur pada huruf d.

Pasal 9

Status kehadiran dan/atau ketidakhadiran ASN pada satu atau beberapa periode waktu presensi yang telah tercatat dalam Sistem Presensi Biometrik dapat dirubah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pengajuan dari Pimpinan OPD ASN yang bersangkutan, yang disampaikan kepada Bupati Sumenep melalui Kepala BKPSDM dengan Tembusan Inspektur Kabupaten Sumenep;
- b. disertai bukti pendukung yang sah;
- c. Pimpinan OPD melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran bukti pendukung yang diajukan;
- d. Status Kehadiran dan/atau Ketidakhadiran ASN yang akan dirubah hanya pada bulan berkenaan;
- e. Kepala BKSPDM memerintahkan kepada Verifikator Sistem Presensi Biometrik untuk merubah status kehadiran/ketidakhadiran ASN apabila Surat Pengajuan Perubahan Status yang disertai dengan Bukti pendukung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diterima oleh Kepala BKPSDM paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 Pencatatan Kehadiran PNS memakai Perangkat Sistem Presensi Elektronik berbasis Biometrik yang untuk selanjutnya dikenal Sistem Presensi Biometrik.
- (2) Dalam Pelaksanaan Sistem Presensi Biometrik diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Presensi Biometrik dipasang di tempat yang mudah diakses oleh Pegawai Negeri Sipil di masing-masing OPD;
 - b. segala sesuatu terkait Sistem Aplikasi Presensi Biometrik adalah kewenangan dan tanggung jawab OPD yang membidangi urusan Kepegawaian;
 - c. segala sesuatu terkait jaringan adalah kewenangan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep;

- d. masing-masing OPD bertanggung jawab atas pemeliharaan, pemanfaatan dan keamanan perangkat Presensi Biometrik dari upaya perusakan serta beban biaya perawatan dan penggantian perangkat Presensi Biometrik jika terjadi kerusakan;
- e. Kepala OPD yang membidangi urusan Kepegawaian melalui administrator, dan verifikator berwenang melakukan monitoring dan memiliki otoritas/akses terhadap sistem dalam rangka pengawasan dan pembinaan kinerja dan kehadiran ASN;
- f. dalam melakukan tugas kewenangannya Administrator dan Verifikator sistem presensi biometrik, ditunjuk oleh Kepala OPD yang membidangi urusan Kepegawaian;
- g. Kepala OPD menunjuk paling sedikit 2 (dua) orang operator Presensi Biometrik.
- h. Operator Presensi Biometrik sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah PNS yang mempunyai integritas serta dapat mengoperasikan komputer dan mengerti sistem informasi.
- i. apabila terjadi pergantian atau mutasi Operator Presensi Biometrik, Kepala OPD segera menunjuk pengganti dan dilaporkan kepada OPD yang membidangi urusan Kepegawaian;
- j. dalam menjalankan tugasnya Operator presensi biometrik wajib saling berkoordinasi dengan administrator dan/atau verifikator.

Pasal 11

- (1) Admin Sistem Presensi Biometrik bertugas :
 - a. modifikasi sistem Presensi Biometrik;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan Sistem Presensi Biometrik;
 - c. menghapus Data ASN yang terekam dalam sistem;
 - d. merekam dan memasukkan data ASN ke dalam sistem;
 - e. melaporkan modifikasi sistem, pemeliharaan sistem, perbaikan sistem, perekaman data ASN, dan penghapusan data ASN setiap bulan kepada Bupati Sumenep melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Verifikator Sistem Presensi Biometrik bertugas :
 - a. monitoring dan pengawasan hasil input kehadiran ASN yang telah dilakukan oleh operator;
 - b. memverifikasi status ketidakhadiran ASN;
 - c. mengevaluasi dan memvalidasi status kehadiran dan/atau ketidakhadiran ASN berdasarkan laporan tertulis dari OPD;
 - d. melaporkan Rekapitulasi Status Kehadiran, Perubahan Status Kehadiran/Ketidakhadiran ASN kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (3) Operator Presensi Biometrik sebagaimana bertugas :
 - a. mengisi keterangan status kehadiran dan/atau ketidakhadiran ASN pada OPD;

- b. mengunggah dokumen bukti status kehadiran dan/atau ketidakhadiran ASN ke dalam sistem;
- c. menyiapkan Form Presensi Manual ASN ketika sistem terjadi gangguan;
- d. mengumpulkan dan merekapitulasi Form Presensi Manual ASN;
- e. melaporkan kepada Administrator Sistem Presensi Biometrik apabila terjadi gangguan sistem;
- f. melaporkan kepada Pimpinan OPD rekapitulasi presensi ASN setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan presensi biometrik terjadi kendala sehingga tidak dapat dioperasikan karena gangguan aplikasi/ jaringan/ perangkat/ kondisi kahar/ bencana, maka presensi dapat dilakukan secara manual sesuai hari kerja terjadinya kendala berdasarkan surat keterangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dan/atau BKPSDM Kabupaten Sumenep.
- (2) Apabila terjadi kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD wajib memberitahukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dan BKPSDM Kabupaten Sumenep.
- (3) Laporan presensi manual dikirimkan kepada Bupati Sumenep melalui Kepala BKPSDM dengan Tembusan Kepala BPPKAD dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan Presensi Manual, harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Pimpinan OPD.
- (5) Bagi OPD yang melaporkan laporan Presensi manual maka capaian skor kehadiran per hari masing-masing PNS dinilai 50% (lima puluh persen) dari capaian skor kehadiran per hari apabila sistem berjalan normal.
- (6) Ketentuan perhitungan skor kehadiran per hari bagi OPD yang melaporkan Presensi Manual sebagaimana diatur pada ayat (5) tidak berlaku bagi OPD yang berada di wilayah Kecamatan Talango, Giligenting, Nonggunong, Gayam, Ra'as, Arjasa, Kangayan, Sapeken, Masalembu.
- (7) Dalam kondisi kahar/bencana OPD yang melaporkan laporan presensi secara manual, maka capaian skor kehadiran per hari masing-masing PNS dinilai sama dengan capaian skor kehadiran per hari apabila sistem berjalan normal.

Pasal 13

- (1) Kepatuhan Pelaporan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b ditujukan kepada PNS yang Wajib Melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana diatur dalam Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan Perhitungan Skor Kepatuhan Pelaporan LHKPN atau LHKASN adalah sebagai berikut :
 - a. ASN yang telah melaporkan LHKPN/LHKASN pada periode berjalan maka Skor Kepatuhan adalah 100 % (seratus persen);
 - b. ASN yang belum melaporkan LHKPN/LHKASN pada periode tahun berjalan maka Skor Kepatuhan adalah 95 % (sembilan puluh lima persen).
- (3) Tambahan Penghasilan bagi ASN akan diberikan penuh ketika ASN yang bersangkutan telah melaporkan LHKPN atau LHKASN.
- (4) Bukti telah melaporkan LHKPN atau LHKASN berdasarkan data kepatuhan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tentang Tata Cara Pelaporan, jenis-jenis Pelaporan, masa waktu pelaporan LHKPN/LHKASN berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 14

Indikator Produktivitas Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) yang diterima oleh ASN berlaku ketentuan :

- a. capaian waktu aktifitas kerja pada jam kerja efektif maksimal 6.600 menit/bulan atas aktifitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama hari dan jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. hasil perhitungan capaian waktu aktifitas kerja ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dicetak melalui Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian dalam bentuk soft copy dan hard copy, setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan input aktifitas kerja harian pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Elektronik.
- (2) Setiap aktifitas yang diinput/dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kinerja pegawai harus nyata, terukur dan terdapat output yang jelas.
- (3) Dokumen/bukti pendukung aktifitas kerja wajib disimpan secara mandiri oleh masing-masing Pegawai.
- (4) Pengisian aktifitas kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. aktivitas kerja pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan, dapat diisi pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan;

- b. aktivitas kerja pada tanggal 16 sampai dengan akhir bulan berkenaan, dapat diisi pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai sampai dengan akhir bulan berkenaan.

Pasal 16

- (1) Validasi aktifitas kerja bawahan pada Sistem Informasi Kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung.
- (2) Dalam hal atasan langsung kosong, validasi aktifitas kerja bawahan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD atau Pyb.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), validasi aktifitas kerja dapat dilakukan oleh Pejabat satu tingkat di atas jabatan atasan langsung.
- (4) Untuk pejabat fungsional tertentu, validasi aktifitas kerja dilakukan oleh Kepala OPD atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang secara struktur mengkoordinasikan tugas jabatan fungsional sesuai bidangnya.
- (5) Aktifitas kerja harian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator yang menjadi pimpinan OPD berlaku ketentuan validasi otomatis.

Pasal 17

- (1) Validasi aktifitas kerja bawahan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. aktivitas kerja bawahan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan dapat divalidasi oleh atasan langsung sampai dengan tanggal 18 bulan berkenaan;
 - b. aktivitas kerja bawahan pada tanggal 16 sampai dengan akhir bulan berkenaan dapat divalidasi oleh atasan langsung sampai dengan tanggal 3 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal atasan langsung menolak aktifitas kerja bawahan, penolakan wajib disertai alasan.
- (3) Bawahan mendapatkan skor atas aktifitas kerja yang telah divalidasi dan disetujui oleh atasan langsungnya.
- (4) Skor yang diperoleh atas capaian aktifitas kerja selama 1 (satu) bulan berjalan akan diakumulasikan dan menjadi dasar perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan tersebut.
- (5) Skor yang diperoleh atas capaian aktifitas kerja selama 1 (satu) bulan berjalan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (6) Atasan langsung yang tidak memvalidasi aktifitas kerja bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), maka akan dikenai pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari perolehan TPP yang dapat dicapai berdasarkan kelas jabatannya.

- (7) Pemotongan TPP sebagaimana diatur pada ayat (6) akan dikurangkan pada pembayaran TPP pada bulan berikutnya.
- (8) Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD dan atau Atasan Pejabat penilai mempunyai kewenangan :
 - a. memantau aktivitas kerja harian PNS dalam OPDnya yang telah diinput;
 - b. Sekretaris Daerah memantau aktivitas kerja harian Pimpinan OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Sumenep;
 - c. membatalkan, mengkoreksi aktivitas kerja harian PNS yang telah divalidasi oleh atasan langsungnya sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dan b;
 - d. kewenangan sebagaimana diatur pada huruf c di atas terhadap pimpinan OPD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Indikator Penilaian Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Data Penilaian Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP OPD Tahun Terakhir merupakan Data yang diperoleh dari Unit kerja yang berwenang melakukan Evaluasi SAKIP;
2. Faktor Koreksi Tingkat Penilaian Hasil Evaluasi Dan Implementasi SAKIP OPD :
 - a. capaian Nilai SAKIP AA sampai dengan A maka skor capaian nilai SAKIP adalah 100 % (seratus persen);
 - b. capaian Nilai SAKIP BB sampai dengan B maka Skor capaian nilai SAKIP adalah 95 % (sembilan puluh lima persen);
 - c. capaian Nilai SAKIP CC sampai dengan C maka Skor capaian nilai SAKIP adalah 85 % (delapan puluh lima persen);
3. Apabila Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP OPD Tahun Terakhir dalam proses Evaluasi dan Penilaian oleh Unit Kerja yang berwenang Melakukan Evaluasi SAKIP maka berlaku ketentuan Faktor Koreksi sebagai berikut :
 - a. Bagi OPD yang sudah menyetorkan Bahan Evaluasi dan Implementasi SAKIP tahun terakhir maka Nilai Faktor Koreksi SAKIP adalah 100 % (seratus persen);
 - b. Bagi OPD yang belum menyetorkan Bahan Evaluasi dan Implementasi SAKIP tahun terakhir maka NILAI SAKIP adalah 80% (delapan puluh persen).
4. Ketentuan Faktor Koreksi Tingkat Penilaian Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP OPD sebagaimana diatur pada angka 3 berlaku hingga Capaian Nilai SAKIP OPD ditetapkan.

5. Faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 atau angka 3 dikalikan dengan capaian TPP berdasarkan produktivitas kinerja masing-masing ASN pada bulan berkenaan.

Bagian Keempat
Formulasi TPP Disiplin Kerja dan Produktifitas Kerja

Pasal 19

- (1) Formulasi TPP berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut :

TPP Disiplin Kerja = 40% x (SKOR KEHADIRAN) x (SKOR KEPATUHAN) x TARIF TPP Per Kelas jabatan

- (2) Formulasi TPP berdasarkan Produktifitas Kerja adalah sebagai berikut :

TPP Produktifitas Kerja = 60% x
$$\left[\frac{\text{Capaian Waktu Aktivitas Kerja Harian}}{6.600} \right] \times \text{(SKOR CAPAIAN SAKIP OPD)} \times \text{TARIF TPP per Kelas jabatan}$$

BAB V
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Pertama
Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD.
- (2) Apabila terjadi kekurangan dalam penganggaran TPP maka OPD yang mengalami kekurangan tersebut mengajukan penambahan anggaran untuk TPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran

Pasal 21

- (1) Mekanisme Pembayaran TPP diatur sebagai berikut :
- a. OPD mengajukan pembayaran TPP yang besarnya telah dihitung sesuai Sistem Manajemen Tambahan Penghasilan, pada bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah;
 - b. pembayaran TPP bulan berkenaan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Bendahara masing-masing OPD kepada ASN penerima dilakukan secara non tunai melalui rekening Bank Smart ID Card paling lambat tanggal 13 bulan berkenaan;
 - c. apabila pengajuan TPP melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) maka TPP tidak dibayarkan;

- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. TPP bagi ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari.
- (2) Apabila terjadi kurang bayar yang disebabkan oleh sistem, dan/atau penghitungan manual, dan/atau kondisi lainnya maka TPP ASN yang bersangkutan bulan selanjutnya ditambah atas kurang bayar pada bulan sebelumnya.
 - (3) Apabila terjadi lebih bayar yang disebabkan oleh sistem dan/atau penghitungan manual, dan/atau kondisi lainnya maka TPP ASN yang bersangkutan bulan selanjutnya dikurangi atas kelebihan bayar pada bulan sebelumnya.
 - (4) Apabila terjadi lebih bayar tidak memungkinkan atau tidak bisa dilakukan pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (3) maka ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan secara tunai.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Terhadap ASN yang mutasi ke OPD lain, maka pemberian TPP dibebankan pada OPD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada OPD dimaksud.
- (2) Apabila pada OPD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP dibebankan pada OPD tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di OPD tempat bertugas yang baru.
- (3) TPP terhadap ASN dari instansi lain yang mutasi masuk ke OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pada OPD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di OPD tempat bertugas yang baru.
- (5) Terhadap CPNS yang diangkat menjadi PNS, maka pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dibayarkan senilai TPP Jabatan Kelas 7 di OPDnya bagi PNS formasi jabatan fungsional ahli, sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional;

- b. Dibayarkan senilai TPP Jabatan Kelas 6 di OPDnya bagi PNS formasi jabatan fungsional terampil sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional;
- c. Perhitungan Skor untuk TPP dihitung pada periode bulan berikutnya setelah yang bersangkutan mengucapkan sumpah pengangkatan menjadi PNS yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengucapkan Sumpah.

Pasal 23

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau nilai/kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya.
- (2) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 24

- (1) Bagi ASN yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan dengan ketentuan :
 - a. pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana ketentuan perhitungan TPP berdasarkan Disiplin Kerja;
 - b. pembayaran TPP berdasarkan Produktifitas Kerja sebelum pensiun dan/atau meninggal dunia dihitung sesuai nilai capaian kerja sebelum pensiun dan/atau meninggal dunia.
- (2) Ketidakhadiran ASN setelah pensiun dan/atau meninggal dunia tidak termasuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga tidak ada pemotongan atau dihitung sebagai hari masuk kerja sampai akhir bulan berkenaan.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Bagi ASN yang terkonfirmasi Positif terjangkit Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka dianggap memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a pada bulan berkenaan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku sampai dicabutnya status darurat bencana *COVID-19* di Kabupaten Sumenep.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pemangku Jabatan Pelaksana/Fungsional dapat ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang, atas usulan Pimpinan OPD melalui BKPSDM.
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) ASN yang memangku jabatan pelaksana berikut kelas jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang ASN tersebut belum dipindah/dimutasi dalam rangka promosi, demosi, dan/atau perpindahan OPD.
- (4) Setiap ASN yang memangku dalam Jabatan Pelaksana dan/atau Fungsional yang berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan harus dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dalam Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan ayat (4) di atas harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (6) Ketentuan Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tingkat Kepatuhan pelaporan LHKPN dan/atau Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKASN sebagaimana diatur pada Pasal 13 dimulai pada Perhitungan Tambahan Penghasilan Bulan Juni pada Tahun berkenaan.
- (7) Ketentuan Pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP OPD sebagaimana diatur pada Pasal 18 dimulai pada perhitungan Tambahan Penghasilan Bulan Juni pada Tahun berkenaan.

Pasal 27

- (1) Ketentuan tentang jam kerja ASN disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang jam kerja ASN yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- (2) Pelaksanaan presensi biometrik bagi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Kelas jabatan bagi masing-masing jabatan yang menerima tambahan penghasilan dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang tercantum pada :

1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 48 Tahun 2017 tentang Presensi Biometrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 04 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumenep ini.

Pasal 30

Sejak Peraturan Bupati Sumenep ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya maka diperintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumenep ini ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **19 JUN 2020**

BUPATI SUMENEP



Dr. K.H. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumenep

Tanggal: **19 JUN 2020**

Tahun: **2020** Nomor: **37**

Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASYADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

JENIS DAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

1. TPP Beban Kerja berlaku Kriteria :

- a. diberikan kepada ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. besaran TPP Beban Kerja adalah maksimum 40% (empat puluh persen) dari basic TPP;
- c. besaran alokasi TPP Beban Kerja dihitung berdasarkan rumus :

$$\mathbf{A\ TPPBK = N\ TPPBK \times B}$$

Keterangan :

- A TPPBK : Alokasi TPP Beban Kerja
N TPPBK : Besaran Presentase Pengali, Maksimum 40%
B : Basic TPP

2. TPP Prestasi Kerja berlaku Kriteria :

- a. diberikan kepada ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. besaran TPP Prestasi kerja adalah maksimum 60% (Enam Puluh Persen) dari basic TPP;
- c. besaran alokasi TPP Prestasi Kerja dihitung berdasarkan rumus :

$$\mathbf{A\ TPPPK = N\ TPPPK \times B}$$

Keterangan :

- A TPPPK : Alokasi TPP Prestasi Kerja
N TPPPK : Besaran Presentasi Pengali, Maksimum 60%
B : Basic TPP

3. TPP Kondisi Kerja berlaku Kriteria :

- a. diberikan kepada ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. besaran TPP Kondisi Kerja adalah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP;
- c. besaran alokasi TPP Kondisi Kerja dihitung berdasarkan rumus :

$$\mathbf{A\ TPPKK = N\ TPPKK \times B}$$

Keterangan :

- A TPPKK : Alokasi TPP Kondisi Kerja
N TPPKK : Besaran presentasi pengali, maksimum 10%
B : Basic TPP ASN

4. TPP Kelangkaan Profesi berlaku kriteria :

- a. diberikan kepada Sekretaris Daerah;
- b. alokasi besaran TPP Kelangkaan Profesi diberikan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari Basic TPP ASN Kabupaten Sumenep;

c. besaran alokasi TPP Kelangkaan Profesi dihitung berdasarkan rumus :

$$A \text{ TPPKP} = N \text{ TPPKP} \times B$$

Keterangan :

A TPPKP : Alokasi TPP Kelangkaan Profesi
N TPPKP : Besaran presentasi pengali, yaitu 110 %
B : Basic TPP ASN

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 36 Tahun 2020
Tanggal : 19 JUN 2020

**BESARAN BASIC TPP
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

BASIC TPP					
Kls Jabatan	Tukin BPK (dalam rupiah)	IKF	IKK	IPPD	Basic TPP (dalam rupiah)
1	2	3	4	5	6=2x3x4x5
15	29.286.000	0,85	1,02	1	25.390.962
14	22.295.000	0,85	1,02	1	19.329.765
13	20.010.000	0,85	1,02	1	17.348.670
12	16.000.000	0,85	1,02	1	13.872.000
11	12.370.000	0,85	1,02	1	10.724.790
10	10.760.000	0,85	1,02	1	9.328.920
9	9.360.000	0,85	1,02	1	8.115.120
8	7.523.000	0,85	1,02	1	6.522.441
7	6.633.000	0,85	1,02	1	5.750.811
6	5.764.000	0,85	1,02	1	4.997.388
5	4.807.000	0,85	1,02	1	4.167.669
4	2.849.000	0,85	1,02	1	2.470.083
3	2.354.000	0,85	1,02	1	2.040.918
2	1.947.000	0,85	1,02	1	1.688.049
1	1.540.000	0,85	1,02	1	1.335.180

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 36 Tahun 2020
 Tanggal 19 JUN 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
1.	SEKRETARIAT DAERAH	15	40,000%	60,000%	10,000%	45,769%	25.390.962	39.551.334	
		14	32,554%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	12.710.094	
		13	17,452%	28,200%	0,000%	0,000%	17.348.670	7.920.015	
		12	19,976%	25,800%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	29,947%	24,600%	0,000%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	19,422%	23,400%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	26,045%	23,400%	0,000%	0,000%	6.522.441	3.225.021	
		7	15,204%	23,400%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	
		6	14,921%	23,400%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	
		5	14,871%	23,400%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	
		4	32,874%	23,400%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.390.015	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	39,032%	23,400%	2,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,931%	36,200%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.150.004	
2.	INSPEKTORAT	14	22,949%	45,000%	5,000%	0,000%	19.329.765	14.100.870	
		12	17,471%	40,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	8.000.121	
		11	27,070%	40,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	7.600.659	Jabatan Administrator
		11	25,200%	40,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	7.400.105	Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli Madya)
		9	14,020%	40,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	4.400.018	Jabatan Pengawas
		9	15,190%	37,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	4.300.202	Jabatan Fungsional Tertentu (Ahli Muda)
		8	25,940%	35,400%	0,000%	0,000%	6.522.441	4.000.865	
		7	7,800%	40,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.760.389	
		6	8,240%	40,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	2.420.735	
		5	9,250%	40,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	2.060.912	
		3	44,100%	40,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.720.494	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
3.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	33,910%	33,000%	5,000%	0,000%	19.329.765	13.900.034	
		12	23,950%	33,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	7.900.104	
		11	31,467%	33,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	7.300.043	
		9	18,756%	33,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	4.200.062	
		8	25,261%	33,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.900.485	
		7	13,255%	33,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.660.038	
		6	13,425%	33,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	2.320.037	
		5	14,029%	33,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.960.013	
		4	36,650%	33,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.720.413	
		3	38,877%	33,000%	7,500%	0,000%	2.040.918	1.620.019	
		2	38,860%	40,000%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.500.000	
		1	39,855%	55,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.400.003	
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	30,154%	30,600%	5,000%	0,000%	19.329.765	12.710.094	
		12	24,280%	28,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	7.280.026	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	30,859%	28,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	6.720.046	
		9	19,982%	28,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.910.027	
		8	25,921%	28,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.630.456	
		7	14,994%	28,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.484.005	
		6	14,983%	28,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	2.158.022	
		5	15,326%	28,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.814.020	
		4	36,090%	28,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.588.016	
		3	39,199%	28,200%	6,000%	0,000%	2.040.918	1.498.013	
		2	39,844%	32,500%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.390.007	
		1	39,366%	48,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.300.011	
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	29,476%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	12.115.124	
		12	24,446%	25,800%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.970.125	
		11	30,555%	25,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	6.430.048	
		9	20,595%	25,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.765.010	
		8	26,252%	25,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.495.507	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		7	15,864%	25,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.396.018	
		6	15,762%	25,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	2.077.014	
		5	15,974%	25,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.741.002	
		4	35,818%	25,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.522.016	
		3	38,900%	25,800%	6,000%	0,000%	2.040.918	1.442.929	
		2	39,086%	30,000%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.335.010	
		1	39,621%	44,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.250.009	
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	13,407%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	8.545.109	
		12	23,037%	13,800%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.110.029	
		11	26,331%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	21,875%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	
		8	27,370%	13,800%	0,000%	0,000%	6.522.441	2.685.289	
		7	18,683%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	18,037%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	
		5	17,470%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.230	
		4	35,840%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.226.149	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	38,677%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,737%	13,800%	6,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	17,163%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	
		9	20,650%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.185	
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	
		4	32,330%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.013	
		3	39,855%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.019	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	22,872%	16,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	26,635%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	21,261%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	25,503%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	17,813%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	17,258%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	16,817%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	
		4	32,060%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.062	
		3	39,270%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.097	
		2	39,595%	16,200%	7,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
9.	DINAS KESEHATAN	14	23,320%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.925.183	
		12	22,376%	23,400%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPKPK ²⁾	N TPKPK ³⁾	N TPKPK ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	27,547%	23,400%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	19,422%	23,400%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	24,512%	23,400%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.225.478	
		7	15,204%	23,400%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	
		6	14,921%	23,400%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	
		5	14,871%	23,400%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	39,032%	23,400%	2,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	20,472%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	24,235%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	18,861%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	23,103%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		7	15,413%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	14,417%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	
		4	29,660%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.062	
		3	36,866%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.016	
		2	39,195%	18,600%	5,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	19,563%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	
		9	20,648%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		4	32,350%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.507	
		3	39,855%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.019	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
12.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	22,872%	16,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	26,635%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	21,261%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	25,503%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	17,813%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	17,258%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	16,817%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	
		4	32,070%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.309	
		3	39,300%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.709	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPP ²⁾	N TPPK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		2	39,595%	16,200%	7,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	20,472%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	24,235%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	18,861%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	Jabatan Pengawas pada Dinas
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	Jabatan Pengawas pada UPT Dinas
		8	23,103%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	15,413%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	Jabatan Pelaksana pada UPT-Dinas
		6	14,858%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	Jabatan Pelaksana pada UPT-Dinas
		5	14,417%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	Jabatan Pelaksana pada UPT-Dinas
		4	29,660%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.062	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	36,866%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.016	
		2	39,195%	18,600%	5,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
14.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	14	19,563%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	
		9	20,648%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	Jabatan Pengawas pada Dinas
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	Jabatan Pengawas pada UPT Dinas
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	Jabatan Pelaksana pada UPT-Dinas
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	Jabatan Pelaksana pada UPT-Dinas
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	
		4	32,330%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.013	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPP ²⁾	N TPPK ³⁾	N TPPK ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	39,860%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.121	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
15.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	14	23,320%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.925.183	
		12	17,577%	28,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.185	
		11	29,947%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	26,912%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.225.478	
		7	17,604%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	
		6	17,321%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	
		5	17,271%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	
		4	35,275%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.390.039	
		3	39,432%	21,000%	4,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,931%	36,200%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.150.004	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
16.	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	14	22,641%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.330.020	
		12	24,941%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.040.008	
		11	29,643%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.560.053	
		9	22,435%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.330.039	
		8	27,242%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.090.463	
		7	18,474%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.132.056	
		6	18,100%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.834.041	
		5	17,920%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.522.033	
		4	35,002%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.324.014	
		3	38,843%	18,600%	4,000%	0,000%	2.040.918	1.254.001	
		2	39,811%	19,500%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.170.004	
1	39,586%	32,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.100.001			
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	23,320%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.925.183	
		12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	29,947%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	26,912%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.225.478	
		7	17,604%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	
		6	17,321%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	
		5	17,271%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	
		4	35,300%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.390.657	
		3	39,432%	21,000%	4,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,931%	36,200%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.150.004	
18.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	22,872%	16,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	26,635%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	21,261%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	25,503%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		7	17,813%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	17,258%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	16,817%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	
		4	32,058%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.013	
		3	39,266%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.016	
		2	39,595%	16,200%	7,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	14,085%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	20,472%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	24,235%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	18,861%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	23,103%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	15,413%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	14,858%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	14,417%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.039	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		4	29,660%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.062	
		3	36,900%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.709	
		2	39,195%	18,600%	5,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
20.	DINAS PENDIDIKAN	14	23,320%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.925.183	
		12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	29,947%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	26,912%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.225.478	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	Jabatan Pelaksana Pada eks UPT Wilayah Daratan
		7	17,604%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		7	16,718%	15,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.824.042	Jabatan Pelaksana pada eks UPT Wilayah Kepulauan Dekat **)
		6	17,321%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		5	17,271%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	Jabatan Pelaksana pada Eks UPT Wilayah Daratan ^{***)}
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	Jabatan Pelaksana pada Eks UPT Wil Kepulauan Jauh ^{*)}
		5	15,389%	15,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.266.513	Jabatan Pelaksana pada eks UPT Wilayah Kepulauan Dekat ^{**))}
		4	35,274%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.390.015	
		3	39,432%	21,000%	4,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	Jabatan Pelaksana pada Eks UPT Wilayah Daratan ^{***)}
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,931%	36,200%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.150.004	
21.	DINAS PERHUBUNGAN	14	17,163%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	Jabatan Pengawas pada UPT Dinas
		9	20,648%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	Jabatan Pengawas pada Dinas
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	Jabatan Pelaksana pada UPT Dinas
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	Jabatan Pelaksana pada UPT Dinas
		4	32,330%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.013	Jabatan Pelaksana pada Dinas
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	Jabatan Pelaksana pada UPT Dinas
		3	39,855%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.019	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
22.	DINAS PERIKANAN	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	20,472%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	24,235%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	18,861%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	23,103%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	15,413%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	14,858%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	14,420%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.164	
		4	29,670%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.309	
		3	36,866%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.016	
		2	39,195%	18,600%	5,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
23.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14	22,641%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.330.020	
		12	22,541%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.040.008	
		11	27,243%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.560.053	
		9	20,035%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.330.039	
		8	24,842%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.090.463	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		7	16,074%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.132.056	
		6	15,700%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.834.041	
		5	15,520%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.522.033	
		4	32,610%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.324.211	
		3	39,443%	21,000%	1,000%	0,000%	2.040.918	1.254.009	
		2	39,311%	21,000%	9,000%	0,000%	1.688.049	1.170.004	
		1	39,586%	32,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.100.001	
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	13,407%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	8.545.109	
		12	20,637%	16,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.110.029	
		11	23,931%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	19,475%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	
		8	23,433%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.685.485	
		7	16,283%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	15,637%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		4	29,400%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.126.358	
		3	36,277%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,337%	16,200%	4,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
25.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	14	19,563%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	JabatanFungsional tertentu Ahli Madya
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	Jabatan Administrator
		9	20,648%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	Jabatan Pengawas
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	Jabatan Pengawas
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama & Penyelia
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	Jabatan Pelaksana

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	Jabatan Fungsional Tertentu Mahir
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	Jabatan Fungsional Tertentu Terampil
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	Jabatan Pelaksana
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	Jabatan Pelaksana
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	Jabatan Fungsional Tertentu Pemula
		4	32,330%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.013	
		3	39,855%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.019	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
26.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	14	23,320%	28,200%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.925.183	
		12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	29,947%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.850.051	
		9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	26,912%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.225.478	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK¹⁾	N TPPPK²⁾	N TPPKK³⁾	N TPPKP⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		7	17,604%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.220.043	
		6	17,321%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.915.049	
		5	17,271%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.595.009	
		4	35,300%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.390.657	
		3	39,432%	21,000%	4,000%	0,000%	2.040.918	1.315.004	
		2	39,169%	23,400%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.225.000	
		1	39,931%	36,200%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.150.004	
27.	DINAS SOSIAL	14	26,763%	18,600%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	
		12	22,707%	18,600%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	26,939%	18,600%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	
		9	20,648%	18,600%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	
		8	25,172%	18,600%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	16,943%	18,600%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	
		6	16,479%	18,600%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	
		5	16,168%	18,600%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		4	32,350%	18,600%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.507	
		3	39,880%	18,600%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.193.529	
		2	39,453%	18,600%	8,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
28.	DINAS TENAGA KERJA	14	16,485%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.140.079	
		12	22,872%	16,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.420.068	
		11	26,635%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.980.056	
		9	21,261%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.040.005	
		8	25,503%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.820.499	
		7	17,813%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.956.023	
		6	17,258%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.672.026	
		5	16,830%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.376.581	
		4	32,060%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.192.062	
		3	39,300%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.132.709	
		2	39,595%	16,200%	7,000%	0,000%	1.688.049	1.060.010	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPP ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		1	39,897%	25,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.000.010	
29.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	27,441%	21,000%	5,000%	0,000%	19.329.765	10.330.020	
		12	22,541%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.040.008	
		11	27,243%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.560.053	
		9	20,035%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.330.039	
		8	24,842%	21,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	3.090.463	
		7	16,074%	21,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.132.056	
		6	15,700%	21,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.834.041	
		5	15,520%	21,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.522.033	
		4	32,602%	21,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.324.014	
		3	39,443%	21,000%	1,000%	0,000%	2.040.918	1.254.001	
		2	39,311%	21,000%	9,000%	0,000%	1.688.049	1.170.004	
		1	39,586%	32,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.100.001	
30.	SEKRETARIAT DPRD	14	19,563%	25,800%	5,000%	0,000%	19.329.765	9.735.050	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		12	20,307%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	5.730.107	
		11	24,539%	21,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	5.270.055	
		9	23,048%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.185.022	
		8	27,572%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.955.448	
		7	19,343%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	2.044.011	
		6	18,879%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.753.034	
		5	18,568%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.449.015	
		4	34,730%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.258.013	
		3	39,255%	16,200%	3,000%	0,000%	2.040.918	1.193.019	
		2	39,853%	16,200%	10,000%	0,000%	1.688.049	1.115.007	
		1	39,942%	28,700%	10,000%	0,000%	1.335.180	1.050.012	
31.	KECAMATAN AMBUNTEN	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
32.	KECAMATAN ARJASA	12	24,611%	23,400%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.660.086	
		11	23,931%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	19,475%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	
		8	23,433%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.685.485	
		7	16,283%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	15,637%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	
		4	29,386%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.126.012	
		3	36,277%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,337%	16,200%	4,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
33.	KECAMATAN BATANG-BATANG	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,720%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.296	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	35,700%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.254	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
34.	KECAMATAN BATUAN	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,730%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.713	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
35.	KECAMATAN BATUPUTIH	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,730%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.713	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
36.	KECAMATAN BLUTO	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,120%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.160	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
37.	KECAMATAN DASUK	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
38.	KECAMATAN DUNGKEK	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
39.	KECAMATAN GANDING	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
40.	KECAMATAN GAPURA	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
41.	KECAMATAN GAYAM	12	24,694%	22,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.505.136	
		11	23,779%	15,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.545.059	
		9	19,781%	15,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.822.520	
		8	23,598%	15,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.617.977	
		7	16,718%	15,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.824.042	
		6	16,027%	15,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.550.540	
		5	15,390%	15,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.266.555	
		4	29,250%	15,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.093.012	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	36,000%	15,000%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.040.868	
		2	37,908%	15,000%	5,000%	0,000%	1.688.049	977.515	
		1	39,280%	20,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	925.013	
42.	KECAMATAN GILIGENTING	12	24,694%	22,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.505.136	
		11	23,779%	15,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.545.059	
		9	19,781%	15,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.822.520	
		8	23,598%	15,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.617.977	
		7	16,718%	15,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.824.042	
		6	16,027%	15,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.550.540	
		5	15,389%	15,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.266.513	
		4	29,250%	15,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.093.012	
		3	35,982%	15,000%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.040.501	
		2	37,908%	15,000%	5,000%	0,000%	1.688.049	977.515	
		1	39,280%	20,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	925.013	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
43.	KECAMATAN GULUK-GULUK	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
44.	KECAMATAN KALIANGET	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPKPK ²⁾	N TPKK ³⁾	N TPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
45.	KECAMATAN KANGAYAN	12	24,611%	23,400%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.660.086	
		11	23,931%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	19,475%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	
		8	23,433%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.685.485	
		7	16,283%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	15,637%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		4	29,386%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.126.012	
		3	36,277%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,337%	16,200%	4,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
46.	KECAMATAN LENTENG	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
47.	KECAMATAN MANDING	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005			
48.	KECAMATAN MASALEMBU	12	24,611%	23,400%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.660.086	
		11	23,931%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	19,475%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		8	23,433%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.685.485	
		7	16,283%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	15,637%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	
		4	29,386%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.126.012	
		3	36,277%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,337%	16,200%	4,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
49.	KECAMATAN NONGGUNONG	12	24,694%	22,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.505.136	
		11	23,779%	15,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.545.059	
		9	19,781%	15,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.822.520	
		8	23,598%	15,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.617.977	
		7	16,718%	15,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.824.042	
		6	16,027%	15,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.550.540	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPP ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		5	15,389%	15,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.266.513	
		4	29,250%	15,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.093.012	
		3	35,982%	15,000%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.040.501	
		2	37,908%	15,000%	5,000%	0,000%	1.688.049	977.515	
		1	39,280%	20,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	925.013	
50.	KEC. PASONGSONGAN	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
51.	KECAMATAN PRAGAAN	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
52.	KECAMATAN RAAS	12	24,694%	22,200%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.505.136	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		11	23,779%	15,000%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.545.059	
		9	19,781%	15,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.822.520	
		8	23,598%	15,000%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.617.977	
		7	16,718%	15,000%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.824.042	
		6	16,027%	15,000%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.550.540	
		5	15,389%	15,000%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.266.513	
		4	29,250%	15,000%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.093.012	
		3	35,982%	15,000%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.040.501	
		2	37,908%	15,000%	5,000%	0,000%	1.688.049	977.515	
		1	39,280%	20,000%	10,000%	0,000%	1.335.180	925.013	
53.	KECAMATAN RUBARU	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
54.	KECAMATAN SAPEKEN	12	24,611%	23,400%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.660.086	
		11	23,931%	16,200%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.690.058	
		9	19,475%	16,200%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.895.069	
		8	23,433%	16,200%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.685.485	
		7	16,283%	16,200%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.868.036	
		6	15,637%	16,200%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.591.018	
		5	15,065%	16,200%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.303.022	
		4	29,386%	16,200%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.126.012	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		3	36,277%	16,200%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.071.013	
		2	39,337%	16,200%	4,000%	0,000%	1.688.049	1.005.014	
		1	39,352%	21,800%	10,000%	0,000%	1.335.180	950.007	
55.	KECAMATAN SARONGGI	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPP ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
56.	KECAMATAN TALANGO	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005			
57.	KECAMATAN SUMENEP KOTA	12	24,776%	21,000%	0,000%	0,000%	13.872.000	6.350.047	
		11	23,627%	13,800%	3,600%	0,000%	10.724.790	4.400.060	
		9	20,088%	13,800%	0,000%	0,000%	8.115.120	2.750.052	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,115%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.036	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
58.	KELURAHAN BANGSELOK	9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
59.	KELURAHAN KARANGDUAK	9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
60.	KELURAHAN KEPANJIN	9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = [(4+5+6+7)x8]	10
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	
61.	KELURAHAN PAJAGALAN	9	21,822%	21,000%	0,000%	0,000%	8.115.120	3.475.057	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		8	23,763%	13,800%	1,540%	0,000%	6.522.441	2.550.470	
		7	17,153%	13,800%	0,000%	0,000%	5.750.811	1.780.049	

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KELAS JABATAN	N TPPBK ¹⁾	N TPPPK ²⁾	N TPPKK ³⁾	N TPPKP ⁴⁾	TARIF BASIC TPP PER KELAS JABATAN (dalam Rupiah)	TARIF BESARAN TPP (dalam Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =[(4+5+6+7)x8]	10
		6	16,416%	13,800%	0,000%	0,000%	4.997.388	1.510.011	
		5	15,713%	13,800%	0,000%	0,000%	4.167.669	1.230.004	
		4	29,114%	13,800%	0,000%	0,000%	2.470.083	1.060.011	
		3	35,688%	13,800%	0,000%	0,000%	2.040.918	1.010.009	
		2	37,478%	13,800%	5,000%	0,000%	1.688.049	950.000	
		1	39,907%	17,500%	10,000%	0,000%	1.335.180	900.005	

KETERANGAN :

1.	N TPPBK adalah	Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja untuk masing-masing Kelas Jabatan pada OPD, Maksimum 40%;
2.	N TPKPK adalah	Besaran Presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Presatasi Kerja untuk masing-masing Kelas Jabatan pada OPD, Maksimum 60%;
3.	N TPPKK adalah	Besaran presentase Pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja untuk masing-masing Kelas Jabatan pada OPD, maksimum 10%;
4.	N TPPKP adalah	Besaran presentase pengali Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi yang diberikan untuk Jabatan Sekretaris Daerah, yaitu maksimum 100.

*)	UPT Wilayah Kepulauan Jauh adalah	UPT Dinas pada wilayah Kecamatan Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, dan Kecamatan Masalembu;
**)	UPT Wilayah Kepulauan Dekat adalah	UPT Dinas pada Wilayah Kec. Giligenting, Kec. Nonggunong, Kec. Gayam, Kec. Ra'as;
***)	UPT Wilayah Darat adalah	UPT Dinas pada Wilayah Kec. Kota Sumenep, Kec. Kalianget, Kec. Talango, Kec. Batuan, Kec. Lenteng, Kec. Saronggi, Kec. Bluto, Kec. Pragaan, Kec. Guluk-guluk, Kec. Ganding, Kec. Rubaru, Kec. Pasongsongan, Kec. Ambunten, Kec. Dasuk, Kec. Manding, Kec. Batuputih, Kec. Batang-batang, Kec. Gapura, Kec. Dungkek.

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 36 Tahun 2020
 Tanggal : 19 JUN 2020

FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL

KOP OPD

DAFTAR HADIR MANUAL

NAMA OPD :

BULAN :

TANGGAL :

No	NIP	NAMA	CHEK-IN		BREAK OUT		BREAK IN		CHEK-OUT		KETIDAK HADIRAN						KET
			JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	I	S	CT	C	CLTN	TK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

..... *)

MENGETAHUI
 PIMPINAN OPD**)
 ttd

NAMA LENGKAP
 NIP.....

NO.	SIMBOL	KETERANGAN
1.	I	Izin yang dibuktikan dengan Surat Izin Tidak Masuk karena Izin
2.	S	Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit
3.	CT	Cuti Tahunan
4.	C	Cuti selain Cuti Tahunan yaitu : Cuti Sakit; Cuti Besar; Cuti Alasan Penting; Cuti Bersalin
5.	CLTN	Cuti Diluar Tanggungan Negara
6.	TK	Tanpa Keterangan
7.	KET.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diisi Apabila PNS yang bersangkutan Terkena Sanksi Hukuman Disiplin Baik tingkat Ringan, Sedang, atau Berat (ditulis format : "Sanksi Ringan/Sedang/Berat; TMT : tgl/bln/thn" 2. Dapat diisi apabila PNS yang Bersangkutan diberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri Karena terkena kasus Pidana 3. Dapat diisi apabila PNS yang bersangkutan sedang menjalani Tugas (ditulis format : "Tugas (jenis tugas) dari tanggal sampai tanggal)
8.	*	Tempat dan tanggal
9.	**	Nama jabatan

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si